
ANALISIS EFEKTIFITAS DBH, DAU, DAN DAK DALAM MENINGKATKAN IPM STUDI KASUS : LIMA WILAYAH KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh:

Musfiq Amrullah Raihan Haj¹

Nuraini²

RT Zakiyah Yusuf³

Alief Rakhman Setyanto⁴

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: JL. Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarami, Kec. Sukarami, Kota Bandar Lampung, Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: musfiq4177rullah@gmail.com, aini55305@gmail.com,
ratuzakiyah05@gmail.com, aliefrahmansetyanto@radenintan.ac.id

Abstract. human development is a key indicator of regional development success, reflected through the human development index (hdi). this study aims to analyze the influence of revenue sharing funds (dbh), general allocation funds (dau), and special allocation funds (dak) on hdi in five districts/cities in lampung province during the period 2019–2024. the research employs a quantitative approach with panel data regression analysis using the fixed effect model (fem). the selection of fem is based on the results of the chow and hausman tests, which indicate significant differences in characteristics across regions. the findings reveal that the three fiscal variables dbh, dau, and dak positively and significantly impact hdi, both individually and collectively. among them, dau has the most dominant effect on hdi improvement because it functions as an instrument for equitable fiscal capacity among regions. the adjusted r-squared value of 0.914070 indicates that 91.41% of the variation in hdi can be explained by these three fiscal variables. this evidence underscores that the effectiveness of fiscal decentralization policies is not only determined by the size of transfer funds but also by the efficiency,

ANALISIS EFEKTIFITAS DBH, DAU, DAN DAK DALAM MENINGKATKAN IPM STUDI KASUS : LIMA WILAYAH KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG

transparency, and good financial governance at the regional level. therefore, enhancing the quality of planning and management of public funds is crucial to accelerating human development equity in lampung province.

Keywords: *Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Human Development Index (HDI), Fiscal Decentralization.*

Abstrak. Pembangunan manusia merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan daerah yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap IPM di lima kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2019-2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel menggunakan model *Fixed Effect Model* (FEM). Pemilihan model FEM didasarkan pada hasil uji Chow dan uji Hausman yang menunjukkan bahwa karakteristik antarwilayah memiliki perbedaan signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel fiskal DBH, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, baik secara parsial maupun simultan. Di antara ketiganya, DAU memiliki pengaruh paling dominan terhadap peningkatan IPM karena berfungsi sebagai instrumen pemerataan kemampuan fiskal antardaerah. Nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,914070 menunjukkan bahwa 91,41% variasi IPM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel fiskal tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana transfer, tetapi juga oleh efisiensi, transparansi, dan tata kelola keuangan daerah yang baik. Dengan demikian, peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan dana publik menjadi kunci dalam mempercepat pemerataan pembangunan manusia di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Desentralisasi Fiskal.

LATAR BELAKANG

Pembangunan manusia merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan sosial. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai indikator kunci untuk menilai capaian pembangunan

pada tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dalam satu dekade terakhir, Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan IPM yang signifikan hingga masuk kategori tinggi, menandakan perbaikan di berbagai aspek sosial-ekonomi. Namun, masih terdapat kesenjangan pembangunan antarwilayah yang cukup mencolok, mencerminkan ketimpangan distribusi hasil pembangunan manusia di tingkat lokal (Setiawan, 2022).

Ketimpangan tersebut menegaskan pentingnya desentralisasi fiskal sebagai instrumen untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya dan pembiayaan secara mandiri sesuai kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi komponen utama yang menopang kapasitas fiskal daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan mampu memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan manusia, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (Mukhlis, 2019).

Ketiga jenis dana transfer dari pemerintah pusat tersebut berperan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. DAU berfungsi menyeimbangkan kemampuan fiskal antardaerah, DAK difokuskan pada kegiatan sektoral seperti pendidikan dan kesehatan, sedangkan DBH merepresentasikan bagi hasil penerimaan negara. Efektivitas pengelolaan ketiganya sangat berpengaruh terhadap struktur APBD dan belanja publik daerah. Dengan demikian, optimalisasi penggunaan dana transfer menjadi kunci keberhasilan peningkatan IPM dan pemerataan pembangunan (Wardhana & Sari, 2024).

Namun, berbagai studi menunjukkan hasil empiris yang belum konsisten terkait pengaruh dana transfer terhadap IPM. Beberapa penelitian menemukan DAU berpengaruh positif signifikan, sementara DBH dan DAK sering kali hanya berpengaruh positif namun tidak signifikan (Wati et al., 2023). Perbedaan ini disebabkan oleh variasi kapasitas fiskal, efektivitas perencanaan, dan tingkat akuntabilitas pengelolaan anggaran di masing-masing daerah. Di Provinsi Lampung, peningkatan IPM tidak selalu sejalan dengan peningkatan dana transfer, menandakan bahwa besarnya dana bukan satunya penentu keberhasilan pembangunan manusia.

Provinsi Lampung memiliki 15 kabupaten/kota dengan variasi IPM yang cukup besar. Kota Bandar Lampung dan Metro memiliki IPM tinggi, sementara kabupaten

ANALISIS EFEKTIFITAS DBH, DAU, DAN DAK DALAM MENINGKATKAN IPM STUDI KASUS : LIMA WILAYAH KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG

seperti Mesuji dan Pesisir Barat masih rendah. Perbedaan ini menunjukkan ketimpangan dalam efektivitas pemanfaatan dana transfer. Penelitian ini memilih lima kabupaten/kota sebagai sampel Bandar Lampung, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tanggamus, dan Pesawaran untuk menganalisis keterkaitan antara DBH, DAU, dan DAK terhadap IPM secara komparatif dan dinamis (Cahyani , 2024).

Tabel 1. DBH, DAU, DAK, dan IPM di 5 Wilayah Provinsi Lampung

Daerah	Periode	DBH (Miliar Rupiah)	DAU (Miliar Rupiah)	DAK (Miliar Rupiah)	IPM
Bandar Lampung	2019	44.34	1114.93	50.96	77.33
	2020	60.82	1019.03	48.01	77.44
	2021	80.90	1002.21	59.17	77.58
	2022	80.36	1002.21	41.81	79.33
	2023	78.91	1065.85	39.50	79.86
	2024	59.18	1131.09	48.43	80.46
Mesuji	2019	22.39	458.68	109.94	63.52
	2020	20.61	407.71	77.77	63.63
	2021	41.95	403.34	107.21	64.04
	2022	48.55	403.97	95.17	67.12
	2023	31.13	418.94	45.72	67.79
	2024	28.00	439.59	153.83	68.59
Tulang Bawang Barat	2019	15.83	488.53	100.41	65.93
	2020	17.84	441.73	90.79	65.97
	2021	25.80	436.39	82.12	66.22
	2022	32.98	437.17	87.68	68.70
	2023	20.23	460.81	41.13	69.38
	2024	16.91	480.91	43.60	70.04
Tanggam us	2019	51.85	802.33	111.80	66.37
	2020	51.50	718.70	126.73	66.42
	2021	95.26	711.72	117.29	66.65

Daerah	Periode	DBH (Miliar Rupiah)	DAU (Miliar Rupiah)	DAK (Miliar Rupiah)	IPM
	2022	134.60	711.91	128.62	69.32
	2023	108.10	750.15	54.94	69.93
	2024	60.56	788.61	81.99	70.54
Pesawaran	2019	16.10	687.09	76.40	65.75
	2020	20.56	619.83	92.55	65.79
	2021	28.08	611.84	95.48	66.14
	2022	37.96	611.84	85.69	68.55
	2023	23.94	634.68	57.05	69.46
	2024	19.03	660.38	71.66	70.24

Sumber : DJPK Kemenkeu dan BPS Lampung

Berdasarkan tabel 1, data menunjukkan bahwa peningkatan dana transfer tidak selalu menghasilkan peningkatan IPM yang sebanding. Misalnya, Tanggamus mengalami penurunan DBH dan DAK tajam, namun IPM-nya tetap meningkat perlahan; sebaliknya, Bandar Lampung dengan dana lebih besar menunjukkan peningkatan IPM yang cepat. Ini menandakan bahwa besarnya alokasi dana tidak otomatis meningkatkan kualitas manusia faktor efisiensi, prioritas program, dan tata kelola fiskal sangat menentukan hasil pembangunan.

Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menelaah satu komponen dana transfer, tanpa mengkaji hubungan simultan antara DBH, DAU, dan DAK terhadap IPM di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, sebagian besar analisis masih berada pada tingkat provinsi secara agregat, sehingga tidak menangkap variasi antarwilayah dan antarwaktu di dalam provinsi. Rendahnya eksplorasi spasial-temporal inilah yang menyebabkan pemahaman empiris tentang efektivitas kebijakan fiskal terhadap pembangunan manusia masih terbatas. Sebaliknya, dari sisi lain, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan panel data lintas wilayah dan waktu untuk menilai pengaruh simultan DBH, DAU, dan DAK terhadap IPM di Provinsi Lampung. Pendekatan ini tidak hanya memperluas konteks analisis desentralisasi fiskal, tetapi juga menghadirkan model empiris yang lebih adaptif terhadap variasi lokal. Dengan demikian, penelitian ini

ANALISIS EFEKTIFITAS DBH, DAU, DAN DAK DALAM MENINGKATKAN IPM STUDI KASUS : LIMA WILAYAH KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG

diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih efektif, terukur, dan berbasis pemerataan pembangunan manusia (Santika , 2024)

Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur tentang hubungan kebijakan fiskal dan pembangunan manusia dalam konteks desentralisasi daerah, sedangkan secara praktis, hasilnya dapat menjadi acuan strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengelolaan dan alokasi dana transfer. Dengan mengidentifikasi komponen dana yang paling berpengaruh terhadap IPM, penelitian ini memberikan kontribusi konkret terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung (Devi & Agustin, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel berbasis logaritma natural (ln). Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan kausal antara variabel fiskal (DBH, DAU, dan DAK) terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan antar waktu dan antar wilayah. Penggunaan logaritma natural bertujuan untuk menstabilkan varians data, mengurangi potensi heteroskedastisitas, serta memudahkan interpretasi elastisitas antarvariabel. Penelitian ini mengacu pada pendekatan kuantitatif yang menekankan efektivitas dana transfer daerah dalam mendukung pembangunan manusia melalui pengelolaan fiskal yang efisien.

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Lampung dengan fokus pada lima wilayah kabupaten/kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pesawaran. Lokasi tersebut dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan perbedaan karakteristik penerimaan dana transfer dan capaian IPM. Periode penelitian mencakup tahun 2019–2024, yang mewakili dinamika fiskal daerah sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19. Rentang waktu ini dianggap memadai untuk menggambarkan perubahan kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap pembangunan manusia di daerah studi.

Tabel 2. Jenis dan Sumber Data

Variabel	Keterangan	Satuan	Sumber Data
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Menggambarkan capaian pembangunan manusia dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak	Angka Indeks	BPS Provinsi Lampung
DBH (Dana Bagi Hasil)	Dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan bagi hasil pajak dan sumber daya alam	Miliar Rupiah	DJPK, Kementerian Keuangan
DAU (Dana Alokasi Umum)	Dana transfer untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah	Miliar Rupiah	DJPK, Kementerian Keuangan
DAK (Dana Alokasi Khusus)	Dana transfer untuk kegiatan prioritas nasional di daerah	Miliar Rupiah	DJPK, Kementerian Keuangan
Periode Waktu	Tahun pengamatan 2017–2023		

Penelitian ini melibatkan satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dalam persen (%). Variabel independen Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Seluruh variabel dinyatakan dalam bentuk logaritma natural (Ln) untuk memperkecil penyimpangan data dan mempermudah interpretasi koefisien elastisitas antarvariabel. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu menelusuri dan mencatat data sekunder dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data yang dikumpulkan berupa laporan keuangan daerah, publikasi statistik, serta dokumen fiskal daerah dalam periode 2019–2024. Setiap data diverifikasi untuk memastikan konsistensi antar tahun dan antar wilayah.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi data panel untuk melihat pengaruh DBH, DAU, dan DAK terhadap IPM di lima kabupaten/kota terpilih di Provinsi Lampung. Regresi data panel menggabungkan dimensi waktu (time series) dan wilayah (cross section), sehingga mampu memberikan hasil estimasi yang lebih informatif dan efisien. Model yang digunakan adalah *Model Fixed Effect* (FEM) dengan metode LSDV

ANALISIS EFEKTIFITAS DBH, DAU, DAN DAK DALAM MENINGKATKAN IPM STUDI KASUS : LIMA WILAYAH KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG

(*Least Squares Dummy Variable*). Model ini dipilih berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman yang menunjukkan bahwa karakteristik tiap daerah memiliki efek tetap (konstan) sepanjang waktu. Pendekatan LSDV digunakan untuk menangkap pengaruh individual masing-masing daerah melalui variabel dummy, sehingga dapat memperhitungkan perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota yang tidak dapat diamati secara langsung.

Model persamaan regresi data panel dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \alpha_i + \beta_1 \log DBH + \beta_2 \log DAU + \beta_3 \log DAK + e_{it}$$

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

α_i = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi untuk Variabel Independen

Log = Logaritma Natural

DBH = Dana Bagi Hasil

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

Tahap analisis data ini diawali dengan pengujian asumsi klasik yang esensial untuk memastikan model regresi yang digunakan telah memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), sehingga hasil estimasi bersifat valid dan tidak bias. Pengujian ini penting untuk validitas inferensi statistik. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, data penelitian ini terbukti telah terbebas dari gejala multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Lebih lanjut, uji normalitas juga mengonfirmasi bahwa data residual telah terdistribusi secara normal. Seluruh pengujian asumsi ini didasarkan pada penetapan taraf signifikansi alpha = 0,05. Karena seluruh kriteria asumsi klasik telah terpenuhi, model regresi ini dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada tahap pengujian hipotesis, baik secara parsial (Uji t), simultan (Uji F), maupun koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pemilihan Model

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model regresi data panel yang paling sesuai adalah *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	Prob.
Cross-section Chi-square	3.197963634	0.0000

Sumber : Olah Data EViews

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada Tabel 3, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model FEM lebih tepat digunakan dibandingkan dengan CEM.

2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk memastikan apakah model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM).

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Statistic	Prob.
Cross-Section Random	41.001123	0.0000

Sumber : Olah Data Eviews

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4, diperoleh nilai probabilitas sebesar **0,0000**, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa FEM kembali menjadi model terbaik dibandingkan REM. Pemilihan FEM pada tahap ini sekaligus memperkuat hasil Uji Chow sebelumnya, sehingga Uji Lagrange Multiplier tidak perlu dilakukan. Penggunaan FEM juga konsisten dengan kajian (Mukhlis, 2019) yang menegaskan bahwa analisis desentralisasi fiskal harus mempertimbangkan heterogenitas antarwilayah.

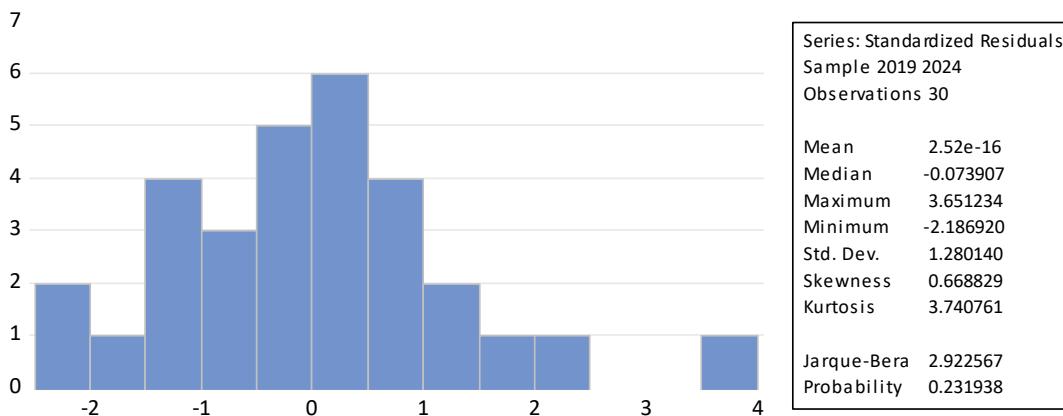
Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

ANALISIS EFEKTIFITAS DBH, DAU, DAN DAK DALAM MENINGKATKAN IPM STUDI KASUS : LIMA WILAYAH KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG

Uji normalitas dilakukan untuk melihat data penelitian apakah terdistribusi normal atau tidak dengan melihat nilai Jarque-Bera (JB). Jika nilai JB $< 5\%$, maka data dikatakan terdistribusii secara normal. Dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Sumber : Olah Data EViews

Pada gambar 1 diatas, menunjukkan bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 1.151699 dan nilai probabilitas sebesar $0.231938 > 5\%$ yang menunjukkan bahwa residual berdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk memastikan bahwa variabel independen dalam model regresi tidak saling berkorelasi tinggi satu sama lain. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada masing-masing variabel. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Coeficient Variance	Centered VIF
C	4.11E+10	NA
LOG_DBH	2.24E+08	1.028776
LOG_DAU	338916.5	1.043531
LOG_DAK	24832.63	1.042100

Sumber : Olah Data EViews

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 5, diketahui bahwa seluruh variabel independen, yaitu DBH, DAU, dan DAK, memiliki nilai VIF < 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antar pengamatan. Penelitian ini menggunakan metode uji Glejser dengan melihat nilai probabilitas Obs R-Squared. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Obs*R-squared	Prob. Chi-Square
3.415177	0.3319

Sumber : Olah Data EViews

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada Tabel 6, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,3319 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Dengan tidak ditemukannya gejala heteroskedastisitas, maka varians residual dalam model berada dalam kondisi yang homogen, sehingga estimasi koefisien regresi dapat dinyatakan stabil dan tidak bias.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terdapat korelasi antara residual dalam model regresi. Metode yang digunakan adalah uji Durbin-Watson (DW).

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Durbin Watson Stat
1.556534

Sumber : Olah Data EViews

Berdasarkan output yang ditunjukkan pada Tabel 7, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,556534. Nilai ini berada dalam rentang 1,5 hingga 2,5,

ANALISIS EFEKTIFITAS DBH, DAU, DAN DAK DALAM MENINGKATKAN IPM STUDI KASUS : LIMA WILAYAH KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari autokorelasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa data panel yang digunakan stabil dari segi dinamika waktu maupun antarwilayah, sehingga analisis regresi yang dilakukan kredibel. Hasil ini juga menegaskan bahwa model FEM yang dipilih sebelumnya tidak hanya tepat dari sisi penentuan model, tetapi juga memenuhi asumsi klasik yang diperlukan dalam analisis regresi panel.

Hasil Analisis Regresi

Hasil analisis regresi data panel dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. Output Regresi Data Panel

Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares
Date: 10/20/25 Time: 18:21
Sample: 2019 2024
Periods included: 6
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	84.39747	7.543934	11.18746	0.0000
LOG DBH	3.871594	1.199822	3.226807	0.0039
LOG DAU	19.00528	7.609414	2.497601	0.0205
LOG DAK	-2.644095	0.939024	-2.815791	0.0101

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.934812	Mean dependent var	69.60300
Adjusted R-squared	0.914070	S.D. dependent var	5.013874
S.E. of regression	1.469756	Akaike info criterion	3.831248
Sum squared resid	47.52400	Schwarz criterion	4.204901
Log likelihood	-49.46872	Hannan-Quinn criter.	3.950783
F-statistic	45.06929	Durbin-Watson stat	1.556534
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Olah Data EViews

Model regresi data panel menggambarkan hubungan antara variabel dependen (IPM) dengan beberapa variabel independen (DBH, DAU, dan DAK) yang diamati pada beberapa unit wilayah dan periode waktu tertentu. Persamaan ini bertujuan untuk mengetahui arah (positif atau negatif) dan besarnya pengaruh masing-masing variabel

fiskal terhadap IPM. Adapun bentuk umum persamaan regresi yang dihasilkan dari estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) adalah sebagai berikut:

$$IPM_{it} = 84,38 + 3,87(\log DBH) + 19,00(\log DAU) + 2,64(\log DAK) + e_{it}$$

Berdasarkan persamaan regresi *Fixed Effect Model* (FEM), hubungan antara variabel fiskal (DBH, DAU, dan DAK) terhadap IPM menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki pengaruh yang dapat diukur melalui arah koefisiennya. Jika koefisien suatu variabel bernilai positif, maka peningkatan alokasi dana pada variabel tersebut berkorelasi dengan peningkatan IPM, sedangkan koefisien bernilai negatif menunjukkan korelasi berlawanan. Secara keseluruhan, hasil regresi menggambarkan bagaimana perbedaan karakteristik antar-daerah (yang ditangkap melalui efek tetap) memengaruhi sensitivitas IPM terhadap masing-masing komponen dana transfer, sehingga model ini mampu memberikan gambaran lebih akurat mengenai faktor fiskal yang berperan dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia di tiap wilayah.

1. Uji t

Hasil uji t menunjukkan bahwa seluruh variabel independen DBH, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap IPM karena masing-masing nilai *t-statistic* lebih besar dari *t*-tabel 2,059538 dan seluruh nilai *Prob* < 0,05. Variabel DBH memiliki *t-statistic* 3,226807 dengan *Prob* 0,0039, sehingga signifikan dan berpengaruh positif terhadap IPM. Variabel DAU memiliki *t-statistic* 2,497601 dengan *Prob* 0,0205, menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap IPM. Sementara itu, variabel DAK memiliki *t-statistic* -2,815791 dengan *Prob* 0,0101, yang juga signifikan namun dengan arah koefisien negatif, sehingga DAK berpengaruh negatif terhadap IPM. Dengan demikian, ketiga variabel secara parsial terbukti signifikan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

2. Uji f

Hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara simultan, karena nilai *F-statistic* = 45,06929 jauh lebih besar daripada *F*-tabel = 2,75871047, dan nilai *Prob(F-statistic)* = 0,000000, yang berada jauh di bawah batas signifikansi 5%. Hal ini berarti bahwa variabel DBH, DAU, dan DAK secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM, sehingga model

ANALISIS EFEKTIFITAS DBH, DAU, DAN DAK DALAM MENINGKATKAN IPM STUDI KASUS : LIMA WILAYAH KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG

yang digunakan dinyatakan layak dan mampu menjelaskan variasi Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan ketiga variabel fiskal tersebut.

3. Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *R-squared* = 0,934812 dan *Adjusted R-squared* = 0,914070, yang berarti sekitar 93,48% variasi IPM dapat dijelaskan oleh variabel DBH, DAU, dan DAK dalam model regresi dengan pendekatan *fixed effect*. *Adjusted R-squared* yang tetap sangat tinggi mengindikasikan bahwa kemampuan penjelasan model tetap kuat meskipun mempertimbangkan jumlah variabel dan sampel. Dengan demikian, hanya sekitar 6,52% variasi IPM yang dijelaskan oleh faktor lain di luar model, sehingga tingkat kecocokan model (*goodness of fit*) dapat dinilai sangat baik dan model mampu menjelaskan sebagian besar perubahan Indeks Pembangunan Manusia..

Pembahasan

1. Pengaruh DBH terhadap IPM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin besar alokasi DBH yang diterima dan dikelola secara efektif oleh pemerintah daerah, maka kapasitas daerah dalam menyediakan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan akan meningkat. DBH yang optimal dapat memperkuat kualitas sarana pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta perluasan akses layanan kesehatan sehingga memberikan dampak langsung terhadap dimensi umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup layak sebagai komponen IPM. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa desentralisasi fiskal mampu memperkuat kualitas pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah (Agustina & Sigalingging, 2024). Selain itu, penguatan kontribusi penerimaan daerah melalui DBH berperan penting dalam mendukung belanja publik strategis yang mendorong kesejahteraan masyarakat (Wardhana & Sari, 2024). Dengan demikian, DBH tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai motor pemerataan pembangunan manusia di daerah.

2. Pengaruh DAU terhadap IPM

Dana Alokasi Umum (DAU) juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM, karena memiliki fungsi utama sebagai sumber pendanaan dasar bagi pemerintah daerah untuk membiayai penyediaan layanan publik. Peningkatan alokasi DAU yang dikelola secara efisien memungkinkan pemerintah daerah memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan, fasilitas kesehatan, serta program pemberdayaan masyarakat. Optimalisasi DAU dapat memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, serta mendukung penurunan angka kesakitan dan angka putus sekolah. Hasil ini mendukung temuan (Santika, 2024) yang menjelaskan bahwa peningkatan belanja publik yang bersumber dari DAU mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, (Cahyani, 2024) menegaskan bahwa peningkatan belanja pemerintah sektor kesehatan dan sosial memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan IPM. Dengan demikian, efektivitas pemanfaatan DAU sangat dipengaruhi oleh kebijakan alokasi dan prioritas belanja pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan manusia.

3. Pengaruh DAK terhadap IPM

Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap IPM terutama karena sifatnya yang diarahkan secara spesifik pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Penyaluran DAK yang tepat sasaran dapat meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, memperluas layanan kesehatan, serta memperkuat sarana dasar yang menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan akan berpengaruh langsung pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan perbaikan derajat kesehatan penduduk. Hasil ini sejalan dengan (Sulaeman & Andriyanto, 2021) yang menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan DAK mampu mendorong peningkatan kualitas SDM apabila alokasi dan implementasinya dilakukan sesuai prioritas kebutuhan daerah. Selanjutnya, DAK memiliki peran determinan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan daerah. Oleh karena itu, efektivitas DAK sangat dipengaruhi oleh

ANALISIS EFEKTIFITAS DBH, DAU, DAN DAK DALAM MENINGKATKAN IPM STUDI KASUS : LIMA WILAYAH KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG

proses perencanaan, penganggaran, dan realisasi yang berorientasi pada pembangunan manusia.

4. Pengaruh DBH, DAU, dan DAK secara Simultan terhadap IPM

Secara simultan, DBH, DAU, dan DAK berperan penting dalam mendukung peningkatan IPM melalui mekanisme pembiayaan yang memperkuat penyediaan layanan publik dan pembangunan sosial di daerah. Kombinasi ketiga jenis transfer fiskal tersebut meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi fiskal yang menekankan kemandirian fiskal daerah dalam mengelola pembangunan. Selain itu, (Zulkarnaini, 2024) menegaskan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal akan tercapai apabila belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan layanan publik. Dengan demikian, kualitas tata kelola anggaran dan akuntabilitas pelaksanaannya menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan DBH, DAU, dan DAK dalam meningkatkan IPM secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di lima kabupaten/kota Provinsi Lampung selama periode 2019–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Di antara ketiga variabel tersebut, DAU memiliki pengaruh paling besar terhadap peningkatan IPM karena berfungsi sebagai instrumen pemerataan kemampuan fiskal antardaerah, yang memungkinkan setiap daerah mampu membiayai pelayanan publik dasar meskipun memiliki kapasitas fiskal yang berbeda-beda.

Temuan ini juga menegaskan bahwa efektivitas kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dialokasikan, tetapi bergantung pada tata kelola, efisiensi, dan transparansi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran publik. Pengelolaan dana transfer yang tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan manusia serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dengan demikian, desentralisasi fiskal yang disertai peningkatan kapasitas perencanaan dan akuntabilitas keuangan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan dana transfer secara efisien. Pemerintah daerah perlu memperkuat perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan agar DBH, DAU, dan DAK benar-benar diarahkan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Sinkronisasi antara kebijakan fiskal pusat dan kebutuhan lokal menjadi penting agar pemanfaatan dana sesuai kondisi daerah. Penerapan penganggaran berbasis kinerja serta evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan setiap alokasi memberikan dampak nyata terhadap peningkatan IPM dan pemerataan pembangunan manusia di Provinsi Lampung.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada periode observasi yang relatif singkat (2019–2024) sehingga belum mampu menggambarkan dampak jangka panjang kebijakan fiskal terhadap pembangunan manusia. Selain itu, penelitian hanya berfokus pada variabel DBH, DAU, dan DAK tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti PAD, investasi, tenaga kerja, dan tingkat kemiskinan yang juga dapat memengaruhi IPM. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel dan menggunakan metode campuran (*mixed methods*) agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan fiskal dan pembangunan manusia di tingkat daerah.

DAFTAR REFERENSI

ANALISIS EFEKTIFITAS DBH, DAU, DAN DAK DALAM MENINGKATKAN IPM STUDI KASUS : LIMA WILAYAH KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG

- Agustina, E., & Sigalingging, E. D. (2024). Dampak desentralisasi fiskal terhadap pembangunan daerah di Provinsi Lampung. *Jurnal Studi Akuntansi Pajak Keuangan*, 2(2), 35–45.
- Cahyani, A. R., Aida, N., & Yuliawan, D. (2024). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran makanan per kapita, dan rasio ketergantungan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Provinsi Lampung. *Jurnal Ekobistek*, 13(1), 13–19.
- Devi, Y., & Agustin, M. (2024). Pengaruh desentralisasi fiskal, investasi, dan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung ditinjau dari perspektif ekonomi Islam tahun 2010–2023. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 1942–1953.
- Mukhlis, M. (2019). Implikasi desentralisasi fiskal terhadap kemandirian daerah pasca pemekaran (studi di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, dan Mesuji Lampung). *COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 147–162.
- Pane, Y., Simarmata, A. M., Rezeki, S., Rinaldi, M., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(2), 212–225.
- Santika, E., Anwar, A., & Isabella, A. A. (2024). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja daerah Provinsi Lampung. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 2737–2748.
- Setiawan, M. B. (2022). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Economia*, 18(1), 23–34.
- Sulaeman, A. S., & Andriyanto, N. (2021). Optimalisasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendorong pertumbuhan pembangunan daerah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(2), 175–200.
- Wardhana, S. A., & Sari, S. P. (2024). Belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Lampung: Amatan terhadap pendapatan daerah dan dana perimbangan. *Media Mahardhika*, 22(2), 289–307.
- Wati, E. J. S., Ridwansyah, E., & Dewi, A. K. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada

kabupaten dan kota di Provinsi Lampung tahun 2016–2019. *Jurnal Ilmiah Esai*, 17(2), 88–98.

Zulkarnaini, Z., Islahuddin, I., Abdullah, S., & Fahira, A. (2024). Systematic literature review: Menilik multi aspek implementasi desentralisasi fiskal pemerintah daerah. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4353–4368.